

INOVASI KEAKSARAAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN ENREKANG

INNOVATION LITERACY FOR EMPOWERMENT AND ERADICATION OF ILLITERACY IN ENREKANG

Patahuddin¹, Syawal², Arham³

e-mail: ¹elbazthakim@gmail.com, ²awal.umpar@gmail.com, ³arham083@gmail.com

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ³Fakultas Ekonomi

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

ABTRAK

Penyelenggaraan program Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara dilaksanakan untuk: a. Mencapai target percepatan penuntasan buta aksara sesuai target Inpres Nomor 5 tahun 2006, sehingga proporsi penduduk buta aksara berusia 15 tahun ke atas adalah paling banyak 5 persen. b. Meningkatkan perluasan akses pendidikan keaksaraan (tingkat dasar) bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. c. Memberikan penguatan keaksaraan bagi sasaran program pendidikan keaksaraan. d. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia secara nasional, melalui peningkatan angka melek aksara penduduk di setiap kabupaten/kota. e. Meningkatkan motivasi dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pendidikan keaksaraan dengan mengembangkan inovasi keaksaraan sesuai potensi dan karakteristik daerah setempat. Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan program ini adalah: (1) Tercapainya target percepatan penuntasan buta aksara sesuai dengan target Inpres Nomor 5 tahun 2006 melalui dukungan perguruan tinggi dan lembaga/organisasi mitra; (2) Meningkatnya akses pelayanan program pendidikan keaksaraan bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas khususnya bagi perempuan, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraannya; (3) Menguatnya keberaksaraan penduduk melalui penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan; (4) Meningkatnya angka melek aksara penduduk di Kabupaten Enrekang, sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia; dan (5) Meningkatnya motivasi dan komitmen lembaga/organisasi penyelenggara di Kabupaten Enrekang untuk mendukung program pendidikan keaksaraan, dan berkembangnya layanan program berupa inovasi keaksaraan sesuai potensi dan karakteristik daerah.

Kata kunci: inovasi keaksaraan; pemberantasan buta aksara; pemberdayaan.

ABSTRACT

Implementation of Innovation program Literacy for Empowerment and Eradication of Illiteracy held for: a. Achieve the target acceleration Illiteracy eradication on target Presidential Instruction No. 5 of 2006, so that the proportion of illiterate population aged 15 years and over are at most 5 percent. b. Promote the expansion of access to literacy education (elementary level) for the illiterate population aged 15 years and over by enhancing the knowledge, attitudes and skills, so it has the ability to improve their welfare. c. Provide literacy for strengthening literacy education programs. d. Improve the human development index, Indonesia nationally, through increased literacy rate in the population of each district/city. e. Increase the motivation and commitment of local government to support literacy education programs to develop innovative literacy according to the potential and characteristics of the local area. The results obtained in the implementation of this program are: (1) The achievement of the target acceleration Illiteracy eradication

program in accordance with the target of Instruction number 5 of 2006 through the support of universities and institutions / partner organizations; (2) Increased access to services literacy education program for illiterate population aged 15 years and above, especially for women, in an effort to improve the knowledge, attitudes and skills, as well as to improve their welfare; (3) The strengthening of literacy of the population through the implementation of literacy education programs; (4) Increased literacy rates in Enrekang population, thus contributing to the increase of Indonesia's human development index; and (5) Increased motivation and commitment of the institution/organization organizer in Enrekang to support literacy education programs, and the development of innovative services such as literacy programs according to the potential and characteristics of the area.

Keywords: innovation literacy; illiteracy eradication; empowerment.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan (pengajaran) dan ayat 2 juga disebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran pendidikan nasional yang diatur undang-undang dan diperkuat juga dalam pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan/penghidupan yang layak. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengungkapkan bahwa selain pendidikan formal (SD, SMP, SMA) juga ada pendidikan non formal (Pendidikan Luar Sekolah) dan informal (keluarga). Keluarnya UU Sisdiknas tersebut tentunya salah satu upaya konkret pemerintah dalam upaya mengatasi meningkatnya jumlah angka putus sekolah, buta aksara yang berimbas kepada meningkatnya pengangguran.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), buta aksara di Indonesia tahun 2005 usia 15 tahun keatas terdapat 14.595.088 orang, terdiri dari laki-laki 4.156.502 orang dan perempuan 10.438.058 orang. Jumlah buta aksara di Sulawesi Selatan masih tergolong besar yaitu 833.005 orang (Data Base Line Survey, 2005). Sedangkan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada

tahun 2006 berjumlah 13,5 juta orang. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya buta aksara di Indonesia. Khusus daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan Rekapitulasi Pendataan Keluarga per 1 Juli 2013 sampai dengan 31 September 2013 untuk warga yang tidak tamat SD sebanyak 10.498 orang, tidak tamat SMP 50.064 orang, tidak tamat SMA 15.159. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tinggal di pedesaan. Umumnya mereka adalah petani kecil, penduduk miskin yang tingkat pendapatan atau penghasilan rendah.

Mereka tertinggal di bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Dikarenakan rendahnya pengetahuan tersebut mereka tertinggal dalam memperoleh akses informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia yang seharusnya mereka peroleh akibat mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan.

Kondisi ini telah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) Indonesia tergolong rendah. Untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, UNDP menetapkan angka tidak buta aksara menjadi variabel penting dari indeks pendidikan, di samping rata-rata lama pendidikan

(Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB:2004). Karena itu, pemerintah berusaha menguranginya melalui berbagai cara, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan program percepatan pemberantasan buta aksara (INPRES No.5 tahun 2006:2006) dengan melibatkan berbagai unsur yang ada.

Sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) daerah Propinsi Sulawesi Selatan, maka terdapat 9 pokok program prioritas, di antaranya adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan. Ada 5 fokus program prioritas Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, di mana program pemberantasan Buta Huruf (Keaksaraan fungsional) merupakan salah satu program prioritas yang harus dan terus menerus dilaksanakan pada setiap tahun. Program garap tuntas buta huruf juga didasari oleh Deklarasi Dakar Senegal tahun 2000 yang menyatakan jumlah buta huruf di dunia sampai dengan tahun 2015 harus diberantas minimal 50% (Kerangka Aksi Dakar Pendidikan:2006); (Permen No. 35: 2006) dan Gerakan wajib belajar sembilan tahun (Permen No.47:2008). Kepedulian semua pihak terhadap penuntasan buta aksara di Indonesia harus ditumbuhkan secara optimal, termasuk kepedulian mahasiswa. Mahasiswa sebagai *agent of reform* sudah semestinya mempunyai kepedulian lebih terhadap masalah-masalah bangsa (termasuk buta aksara). Hal ini menjadi penting ketika mahasiswa diartikan sebagai aset (pemimpin) bangsa yang akan datang. Dengan demikian pelibatan mahasiswa dalam penuntasan buta aksara menjadi penting dan strategis. Pelibatan mahasiswa tersebut dapat dikemas melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Jumlah peserta KKN

Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) minimal 500 mahasiswa/semester merupakan potensi yang besar dan strategis dalam upaya membantu pemerintah dalam menuntaskan buta huruf di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya.

Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara dilaksanakan bekerja sama dengan DIKLUSEPORA (Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Enrekang dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare di Kabupaten Enrekang yang berlokasi di 2 (dua) desa yakni Desa Potokkullin dan Desa Latimojong. Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) inovasi keaksaraan untuk pemberdayaan dan pemberantasan buta aksara di Kabupaten Enrekang adalah untuk mengurangi dan memberdayakan masyarakat buta aksara. Oleh karena itu, lahirnya masyarakat yang melek aksara dan berdaya saing merupakan harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini.

METODE PELAKSANAAN

A. Persiapan dan Pembekalan

1. *Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program*

Sosialisasi dan koordinasi Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat UMPAR di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan meminta dukungan masyarakat dan Pemerintah di lokasi Program. Hal ini tidak saja ditentukan oleh kualitas desain program dan komitmen pihak pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

dukungan masyarakat. Menyadari hal inilah, maka sebelum dilaksanakan program, pihak pelaksana sudah melakukan upaya konsolidatif untuk menumbuhkembangkan dukungan masyarakat.

2. Pembekalan Peserta KKN-PPM dan Rekrutmen Warga Belajar

Dalam melakukan perekrutan Peserta KKN-PPM dilakukan dengan cara orientasi/pelatihan yang dilaksanakan dalam Pembekalan Mahasiswa KKN UMPAR. Pelaksanaan tugas peserta KKN-PPM di tingkat mahasiswa KKN direkrut dengan mengikuti orientasi/pelatihan melalui Training of Trainer (TOT) dengan memberikan tata cara pengajaran pada proses pembelajaran bagi peserta warga belajar.

Dalam melakukan pengrekrutan Warga Belajar (WB) pada Program Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Prioritas usia 15 – 45 tahun, apabila di daerah tersebut tidak terdapat sasaran usia tersebut, maka sasaran yang berusia di atas 45 tahun dapat direkrut menjadi warga belajar,
- 2) Sosial ekonomi rendah,
- 3) Pendapatan rendah,
- 4) Belum memiliki keterampilan atau bekal yang dapat dijadikan mata pencaharian,
- 5) Buta aksara,
- 6) Putus SD/MI kelas I-III atau tidak pernah mengenyam pendidikan,
- 7) Bersedia melaksanakan hak dan kewajiban sebagai WB.
- 8) Dalam perekrutan warga belajar, setiap warga belajar mempunyai hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut:
 - (1) Kewajiban Warga Belajar

- (a) Mengikuti proses pembelajaran dalam kelompok belajar berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama,
 - (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelompok, dan mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama,
 - (c) Menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang dibebankan oleh tutor baik tugas mandiri maupun kelompok,
 - (d) Mengikuti penilaian hasil belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak Warga Belajar
- (a) Memperoleh bimbingan belajar,
 - (b) Memperoleh bahan belajar pokok seperti buku dan alat-alat tulisnya. Modul-modul dan bahan belajar muatan lokal, dan memperoleh sarana belajar yang diperlukan untuk kegiatan praktek keterampilan fungsional,
 - (c) Memperoleh minimal satu keterampilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh warga belajar,
 - (d) Mendapatkan laporan kemajuan dan pencapaian hasil belajar secara berkala,
 - (e) Mendapatkan Sertifikat Bebas Buta Aksara setelah melalui proses penilaian akhir pembelajaran.

Rekrutmen WB menjadi penting dan strategis sebelum pelaksanaan Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara dimulai. Rekrutmen WB dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi program Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta

Aksara dilaksanakan di Kecamatan dan dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan program.

- 2) Penjaringan dan pendataan WB yang melibatkan mahasiswa KKN UMPAR, Cabang Dinas Pendidikan, Panitia Penyelenggara Desa (Kepala Desa).
- 3) Jika minggu I pelaksanaan program Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara terdapat WB yang mutasi/drop out/mengundurkan diri, maka mahasiswa KKN UMPAR, Panitia Penyelenggara Desa (Kepala Desa) harus segera mengusahakan penggantian.
- 4) Jika sampai dengan akhir minggu I target jumlah WB tidak terpenuhi, maka sejumlah WB akan dialihkan ke tempat lain yang mempunyai jumlah WB lebih dari target yang ditentukan. Pengaturan pengalihan jumlah WB ini akan dikoordinasikan oleh Ketua Panitia Pengelola Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara.

B. Persiapan Bahan Ajar

Bahan ajar yang digunakan dalam dalam Program Inovasi Keaksaraan untuk Pemberdayaan dan Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan adalah menggunakan bahan pembelajaran tematik sesuai dengan potensi daerah dan minat serta kebutuhan warga belajar. Persiapan bahan bahan ajar dilakukan dengan mengambil referensi buku praktis yang telah direkonstruksi, disamping menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa daerah (Enrekang) dimaksudkan agar peserta warga belajar dapat memahami arti sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat membaca,

menulis, dan berhitung sesuai target yang diharapkan.

1. Proses Penyelenggaraan Pembelajaran

Untuk program keaksaraan fungsional program belajar dirancang untuk peningkatan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang bahan ajarnya responsif dengan keterampilan mata pencaharian atau usaha warga belajar yang dapat diaplikasikan secara langsung, sehingga pada akhir program belajarnya mereka sudah memiliki keterampilan calistung yang dapat dijadikan tambahan bekal mata pencahariannya. Beberapa strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran program keaksaraan fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi pendekatan langsung yang berarti bahan ajar langsung dibaca tanpa dieja, caranya aksara yang tertulis dalam buku dibaca langsung (dibunyikan) dengan lafaz dan nada yang tepat, tidak dieja atau diurai secara teoritis.
- 2) Strategi pembelajaran aktif, dimana warga belajar didorong dan dikondisikan untuk aktif membaca tanpa banyak dituntun oleh Tutor. Tutor memberi petunjuk seperlunya dan lebih banyak menyimak. Tutor berperan sebagai fasilitator dan motivator.
- 3) Strategi pembelajaran sistematis, dimana pengenalan huruf latin disusun secara bertahap dan terpadu antara huruf hidup (vokal) dan huruf mati (konsonan), lalu disusul dengan huruf kapital dan huruf kecil secara bersamaan.
- 4) Strategi pembelajaran tematis, dimana pembelajaran yang menampilkan tema-tema tertentu dan keterampilan lokal yang berhubungan langsung dengan warga belajar.

2. Melakukan Penilaian Hasil Belajar

Penilaian belajar dilakukan (1) Penilaian Awal (*Pra Test*), (2) Penilaian tengah program (PTP) dan (3) Penilaian Akhir Program (PAP). Metode penilaian yang digunakan adalah tes tulis dan tes kinerja. Penilaian awal dilakukan sebelum warga belajar memulai belajar bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal warga belajar dan penilaian akhir dilakukan setelah warga belajar menyelesaikan program belajarnya. Penilaian awal, tengah, dan akhir dilakukan sesuai indikator keberhasilan keaksaraan.

Penilaian belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen (soal ujian) yang disusun berdasarkan kompetensi yang diujikan. Soal ini telah di *Tray out* dengan hasil validitas dan reliabilitas yang baik. Soal ujian terdiri dari 25 soal, dimana 7 soal untuk uji kompetensi membaca (soal nomor 1-7), 9 soal untuk uji kompetensi menulis (soal nomor 8-16), dan 9 soal untuk uji kompetensi membaca (soal nomor 17-25). Secara detail soal ujian dapat dilihat dalam lampiran. $NILAI\ AKHIR = JML\ SOAL\ BENAR \times 4$, Kriteria Lulus Pendidikan Keaksaraan Program Bantuan Penyelenggaraan diberikan kepada WB dengan nilai akhir minimal 60 dengan pemenuhan kompetensi umum yaitu mampu membaca kalimat yang disusun ≥ 7 kata dengan lancar, mampu menulis kalimat yang disusun ≥ 7 kata, dengan lancar, dan mampu menggunakan operasi matematika (+, -, x, dan :) dengan hasil akhir ≥ 100 dengan lancar. Warga Belajar yang telah Lulus Ujian Akhir akan diberi Sertifikat Bebas Buta Aksara (penganti sementara SKBBA-1) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMPAR.

3. Melakukan Monitoring dan Eva-

luasi dalam Upaya Penjaminan Mutu Proses Belajar dan Pelaksanaan Program

Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan, maka selama proses kegiatan akan dilakukan monitoring oleh penyelenggara (setiap minggu sekali). Sebelum kegiatan dilaksanakan akan dilakukan diseminasi program terlebih dahulu untuk menyamakan visi dan persepsi semua komponen yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ini berdayaguna dan berhasil guna demi upaya serius untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

a) Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring penyelenggaraan keaksaraan fungsional, merupakan upaya pengendalian dan pembinaan yang terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam prosesnya monitoring meliputi aspek komponen program, aspek substansi program, dan aspek dukungan program.

b) Evaluasi Pelaksanaan Program

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam penyelenggaraan adalah: warga belajar, tutor, penyelenggara atau pengelola program, kelompok belajar, waktu dan tempat belajar, program belajar, proses pembelajaran, bahan dan media belajar, penilaian hasil belajar. Evaluasi dilakukan pada saat proses, dan pada akhir penyelenggaraan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan WB dalam membaca, menulis dan menghitung sebelum diberikan pembelajaran dan setelah diberikan

pembelajaran. Dibawah ini diuraikan kemampuan masing-masing WB pada setiap desa, sebelum mengikuti pembelajaran.

1. Desa Latimojong

Di desa ini terdapat 5 dusun yang dengan kondisi geografis berupa jajaran perbukitan. Adapun gambaran hasil *pre-test* WB di desa ini akan diuraikan berdasarkan tiga kemampuan dasar WB.

1) Kemampuan membaca WB

Secara umum kondisi WB rata-rata belum mampu mengenali huruf secara cepat dan tepat. Sedangkan WB yang sudah mengenali huruf masih harus mengeja huruf ketika mahasiswa KKN-PPM meminta mereka untuk membaca kata sehingga untuk membaca kalimat mereka sangat kewalahan. Bahkan ditemukan WB yang meminta untuk tidak menyelesaikan proses *pre-test*.

2) Kemampuan WB menulis

Tidak jauh berbeda dengan kemampuan WB membaca, kondisi WB dalam menulis pun rata-rata masih sangat kesulitan. Mereka sangat kaku dalam menggerakkan alat tulis, hal ini semakin dipersulit dengan terbatasnya ruang menulis yang disiapkan pada lembar *pre-test* yang disiapkan. Adapun WB yang sudah mengenali huruf masih belum mampu menulis dengan cepat dan tepat.

3) Kemampuan WB menghitung

Kemampuan WB dalam penjumlahan, pengurangan dan perkalian secara umum cukup baik tetapi ketika diperhadapkan dengan angka-angka umumnya mereka kesulitan menghafal tulisan berbentuk angka. Hal yang cukup menyenangkan bahwa mereka secara umum cukup pandai dalam menghitung uang tetapi ketika

diperhadapkan dengan perkalian dalam bentuk puluhan mereka sangat kesulitan.

2. Desa Potokkullin

Di desa ini terdapat 6 dusun yang dengan kondisi geografis berupa jajaran perbukitan. Dusun yang dimaksud yakni; Dusun Buntu Lenta, Dusun Kalaciri, Dusun Matawai, Dusun Datte, Dusun Ledan dan Dusun Bongso. Adapun gambaran hasil *pre-test* WB di desa ini akan diuraikan berdasarkan tiga kemampuan dasar WB;

1) Kemampuan membaca WB

Hasil temuan dalam *pre-test* menunjukkan bahwa kondisi WB umumnya belum mampu mengenali huruf secara cepat dan tepat. Adapun WB yang sudah mengenali huruf masih harus mengeja huruf ketika mahasiswa KKN-PPM meminta mereka untuk membaca kata sehingga untuk membaca kalimat mereka sangat kewalahan. Temuan yang lain yakni adanya beberapa WB yang memilih untuk tidak menyelesaikan proses *pre-test* karena mereka merasa malu pada sanak family mereka.

2) Kemampuan WB menulis

Tidak jauh berbeda dengan kemampuan WB membaca, kondisi WB dalam menulis pun rata-rata masih sangat kesulitan. Mereka sangat kaku dalam menggerakkan alat tulis, hal ini semakin dipersulit dengan terbatasnya ruang menulis yang disiapkan pada lembar *pre-test* yang disiapkan. Adapun WB yang sudah mengenali huruf masih belum mampu menulis dengan cepat dan tepat.

3) Kemampuan WB menghitung

Kemampuan WB dalam penjumlahan, pengurangan dan perkalian secara umum cukup baik tetapi ketika diperhadapkan dengan angka-

angka umumnya mereka kesulitan menghafal tulisan berbentuk angka. Hal yang cukup menyenangkan bahwa mereka secara umum cukup pandai dalam menghitung uang tetapi ketika diperhadapkan dengan perkalian dalam bentuk puluhan mereka sangat kesulitan.

Setelah diketahui kemampuan WB sebelum mengikuti pembelajaran, maka dilakukan pembelajaran selama sepuluh pekan dimana mahasiswa KKN-PPM secara langsung mendatangi setiap WB. Pembelajaran dilakukan secara intensif setiap hari selama 2 jam, keaktifan mahasiswa KKN-PPM mendatangi para WB memberikan efek positif dimana para WB secara sadar langsung mempersiapkan diri jika melihat mahasiswa KKN-PPM telah tiba di tempat mereka. Berdasarkan hasil evaluasi proses yang dilakukan pada pekan ke-5 ditemukan bahwa para WB sudah mulai mampu membaca, menulis dan menghitung meskipun masih cukup kesulitan. Peningkatannya dapat dilihat dari kemampuan mereka secara umum yang tadinya belum mampu sekarang sudah mulai mampu.

Pemberian program keaksaraan dasar diharapkan telah mencapai hasil sebagai berikut:

- (a) Meningkatnya akses pelayanan program pendidikan keaksaraan dasar.
- (b) Meningkatnya kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia oleh penduduk buta aksara usia 15 tahun peserta program keaksaraan dasar sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK).
- (c) Meningkatnya keberdayaan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas peserta program keaksaraan

dasar yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka setelah mengikuti pembelajaran.

- (d) Peserta didik dapat mencapai kompetensi keaksaraan dasar minimal 70% dengan indikator dapat mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung sederhana menggunakan bahasa Indonesia dan Peserta didik yang sudah mencapai indikator tersebut diberikan Sertifikat Bebas Buta Aksara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; Proses sosialisasi yang dilakukan oleh peserta KKN-PPM, mendapat sambutan sangat baik oleh warga yang ada dilokasi KKN-PPM dilaksanakan; Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) sangat membantu masyarakat di pedesaan, salah satu contohnya adalah program pemberdayaan dan pemberantasan buta aksara dimana warga sangat terbatu dengan program ini; Pengalaman yang didapatkan oleh peserta KKN di lapangan yaitu peserta KKN dapat lebih memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat secara kompleks serta bagaimana cara beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan yang baru merupakan hal yang langka di dapat selama di bangku kuliah yang dapat menjadikan modal untuk menghadapi masa depan; dan dengan rampungnya program kerja mahasiswa KKN-PPM, maka penjabaran Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada masyarakat telah terlaksana, dimana peserta KKN telah mengaplikasikan ilmu yang didapat di

bangku kuliah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Direktorat Jendral Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) KEMRISTEK DIKTI sebagai penyandang dana dan atas kepercayaannya kepada tim pelaksana KKN-PPM Univ. Muhammadiyah Parepare sebagai pelaksana KKN-PPM tahun anggaran 2015.
2. Pemerintah Daerah Kab. Enrekang beserta seluruh jajarannya terkhusus kepada aparat pemerintahan di Kec. Buntu Batu, Kepala desa desa potokkullin beserta jajarannya, Kepala desa Latimojong beserta jajarannya atas dukungan yang diberikan baik materil maupun dukungan moril
3. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Enrekang khususnya DIKLUSEPORA (Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan KKN-PPM ini.
4. Seluruh masyarakat Desa Potokkullin dan Desa Latimojong atas partisipasi dan keikutsertaan, serta keramahannya dalam menyambut dan mendukung terlaksananya kegiatan KKN-PPM selama 2 bulan di kedua desa tersebut.
5. Seluruh mahasiswa peserta KKN-PPM posko desa potokkullin dan desa Latimojong atas segala dedikasinya hingga program KKN-PPM ini berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Tahun 2005
Badan Pusat Statistik Tahun 2006

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2013

Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (*United Nations Decade of Education for Sustainable Development*) 2004-2014.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA).

Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (*The Dakar Framework for Action on Education for All*).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.